



Kementerian Dalam Negeri
Ditjen Bina Keuangan Daerah



KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAK DALAM APBD TA 2023

Disampaikan Oleh:

DR. Sumule Tumbo, SE, MM

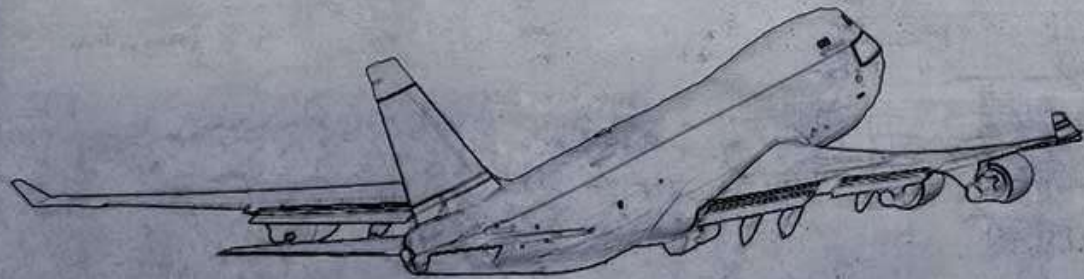
Direktur Fasilitas Dana Perimbangan
& Pinjaman Daerah

DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



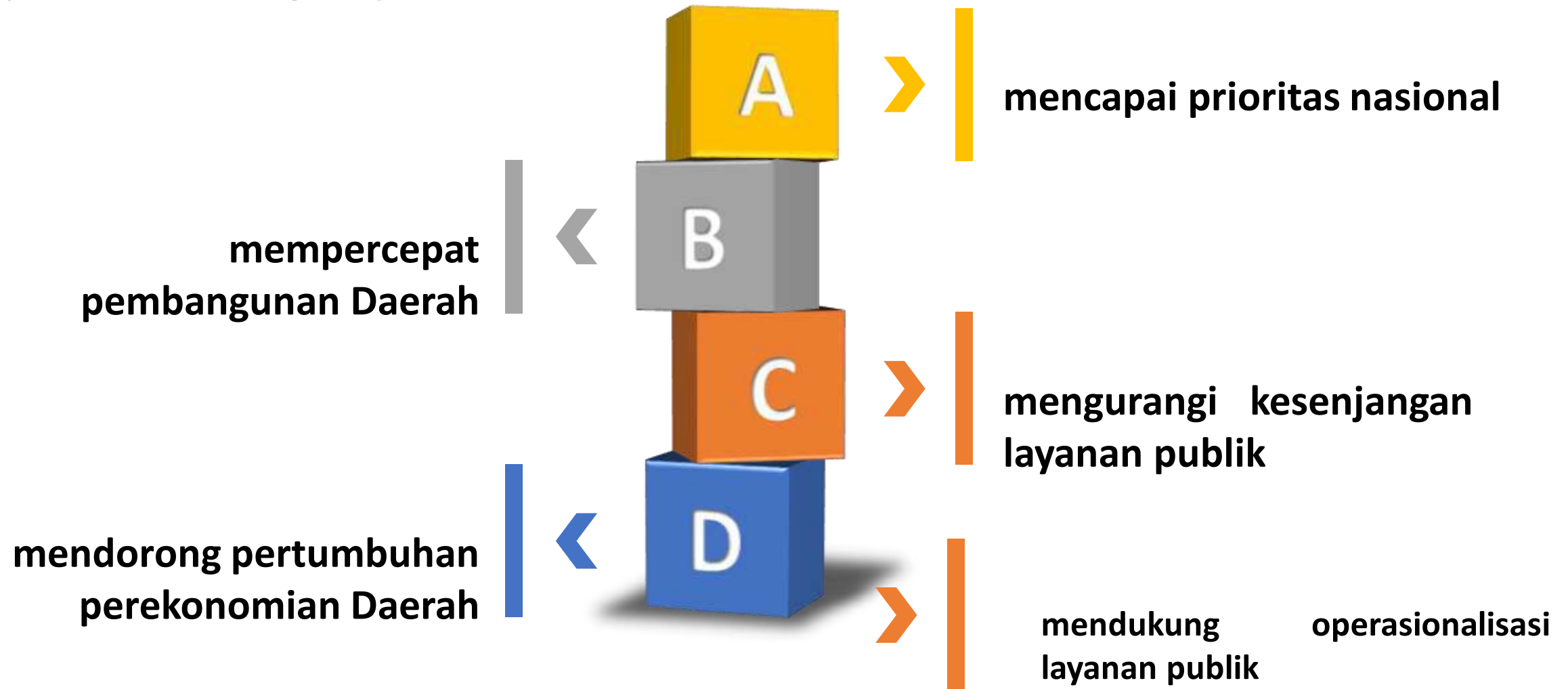
OUTLINE

- 1 PENGELOLAAN DAK DALAM APBD TA 2023
- 2 IMPLIKASI KODEFIKASI, KLASIFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH
- 3 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAK PADA PEMERINTAH DAERAH TA 2022





DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan *tujuan*:





Jenis Dana Alokasi Khusus



1

DAK Fisik

Digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah

2

DAK Nonfisik

Digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah

3

Hibah kepada Daerah

Digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah



SINERGI PENDANAAN DAK



Penyinergian DAK dengan pendanaan lainnya bertujuan untuk mendukung pencapaian program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu.



Pendanaan lainnya dapat berasal dari Tranfer Ke Daerah (TKD) lainnya, Pembiayaan Utang Daerah, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, kerja sama antar-Daerah, dan belanja kementerian/lembaga.



Belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai urusan Daerah dialihkan menjadi DAK dalam hal Daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD





PENGELOLAAN DAK DALAM APBD TA 2023

Arah Kebijakan DAK Fisik & Non-Fisik Tahun 2023

DAK Fisik



Mendorong percepatan penyediaan infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan serta mendukung tematik tertentu sesuai dengan Prioritas Nasional



Mempertajam fokus kegiatan DAK Fisik yang berorientasi hasil dan berdampak langsung pada pembangunan daerah dan PN berbasis pada capaian target kinerja



Mempertajam implementasi konsep tematik berbasis pendekatan holistik, integratif dan spasial dalam rangka pencapaian outcome yang



Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi berbasis web dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaporan hingga pemantauan dan evaluasi DAK



Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik melalui penguatan alokasi berbasis kinerja dan penguatan kualitas pengawasan



Memperkuat sinergi pemanfaatan dan efisiensi belanja DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung baik APBD, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

DAK Non-Fisik



Melanjutkan penyediaan dan pemerataan operasionalisasi layanan Pendidikan dan Kesehatan sesuai target Prioritas Nasional



Memperkuat dukungan pendanaan bagi pencapaian Prioritas Nasional



Meningkatkan sinergi pendanaan DAK Non- Fisik dengan sumber pendanaan lainnya.



KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2023

Karakteristik semua DAK Fisik adalah “DAK Penugasan” dengan target per-bidang/subbidang spesifik, lokpri selektif dan kegiatan fokus. Daerah penerima DAK dipilih dalam rangka mendukung capaian target PN atau Mayor Proyek (MP) tertentu berdasarkan konsep Tematik berbasis pendekatan Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

DAK Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia



Bidang Pendidikan (termasuk Perpustakaan)

Mendukung PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing



Bidang Air Minum

Fokus pada dukungan MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting



Bidang Kesehatan (termasuk KB)

Mendukung PN 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing



Bidang Sanitasi

Fokus pada dukungan MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting

DAK Mendukung Konektivitas Daerah



Bidang Jalan

Mendukung PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar



KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2023 (Lanjutan...)

Karakteristik semua DAK Fisik adalah “**DAK Penugasan**” dengan target per-bidang/subbidang spesifik, lokpri selektif dan kegiatan fokus. **DAK Tematik berbasis intervensi yang Holistik, Integratif dan Spasial dalam mendukung Tematik tertentu.**

DAK Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur

1. DAK Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas



Pariwisata



IKM



UMKM



Perdagangan



Lingkungan
Hidup



Jalan

2. DAK Tematik Penanganan Kawasan Kumuh**



Air Minum



Sanitasi



Perkim

****DAK Permukiman Terintegrasi**

3. DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi



Transportasi
Perdesaan



Transportasi
Perairan



Jalan



Energi Baru
Terbarukan (EBT)*

*EBT merupakan bidang baru di DAK Tahun 2023

DAK Mendukung Ketahanan Pangan

4. DAK Tematik Pengembangan *Food Estate*



Pertanian



Irigasi



Jalan



Kehutanan

5. DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)



Pertanian



Irigasi



Kelautan
Perikanan



Jalan

- DAK Tematik Pengembangan Food Estate (FE) difokuskan pada 5 Lokasi FE dengan fokus kepada tanaman pangan dan hortikultura
- DAK Tematik penguatan Kawasan sentra produksi pangan ditujukan untuk lokasi selain FE dengan fokus pertanian, perikanan dan hewani

STRUKTUR APBD



PP 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah



Pendapata
n

Belanja

Pembiayaa
n



Pendapatan Daerah

1. PAD
 - a. Pajak
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan
 - d. Lain2 PAD yg sah
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - b) Dana Transfer Khusus**
 - i. DAK Fisik
 - ii. DAK Non Fisik
 - 2) Dana Insentif Daerah
 - 3) Dana Otonomi Khusus
 - 4) Dana Kesitimewaan
 - 5) Dana Desa
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Pendapatan bagi hasil
 - 2) Bantuan Keuangan
3. Lain-lain PD yg sah
 - a. Hibah
 - b. Dana darurat
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai per-UU an



Belanja Daerah

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang/Jasa
 - c. Belanja Bunga
 - d. Belanja Subsidi
 - e. Belanja Hibah
 - f. Belanja Bansos
2. Belanja Modal
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

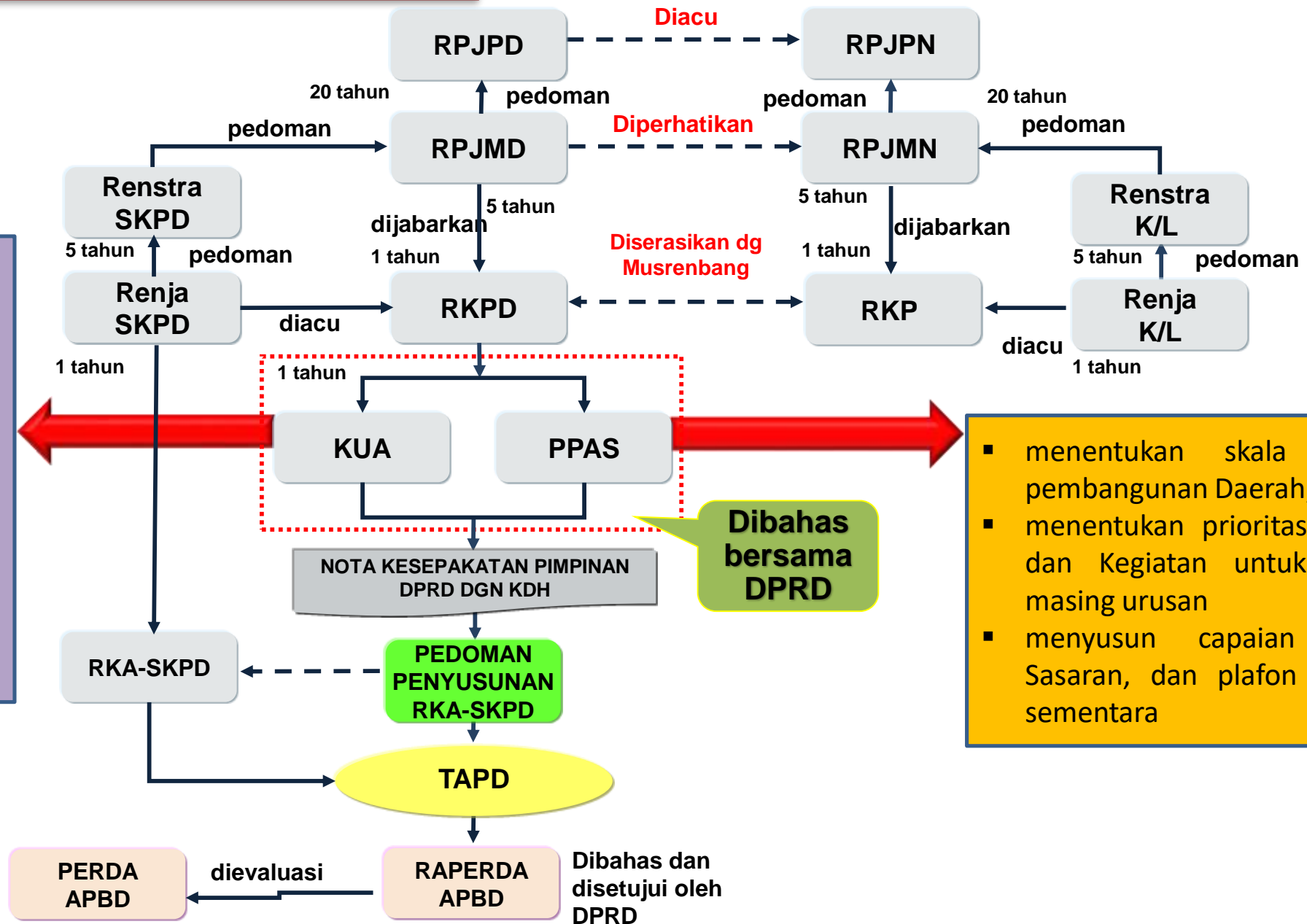


Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yg jatuh tempo
 - b. Penyertaan Modal Daerah
 - c. Pembentukan Dana Cadangan
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan



PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

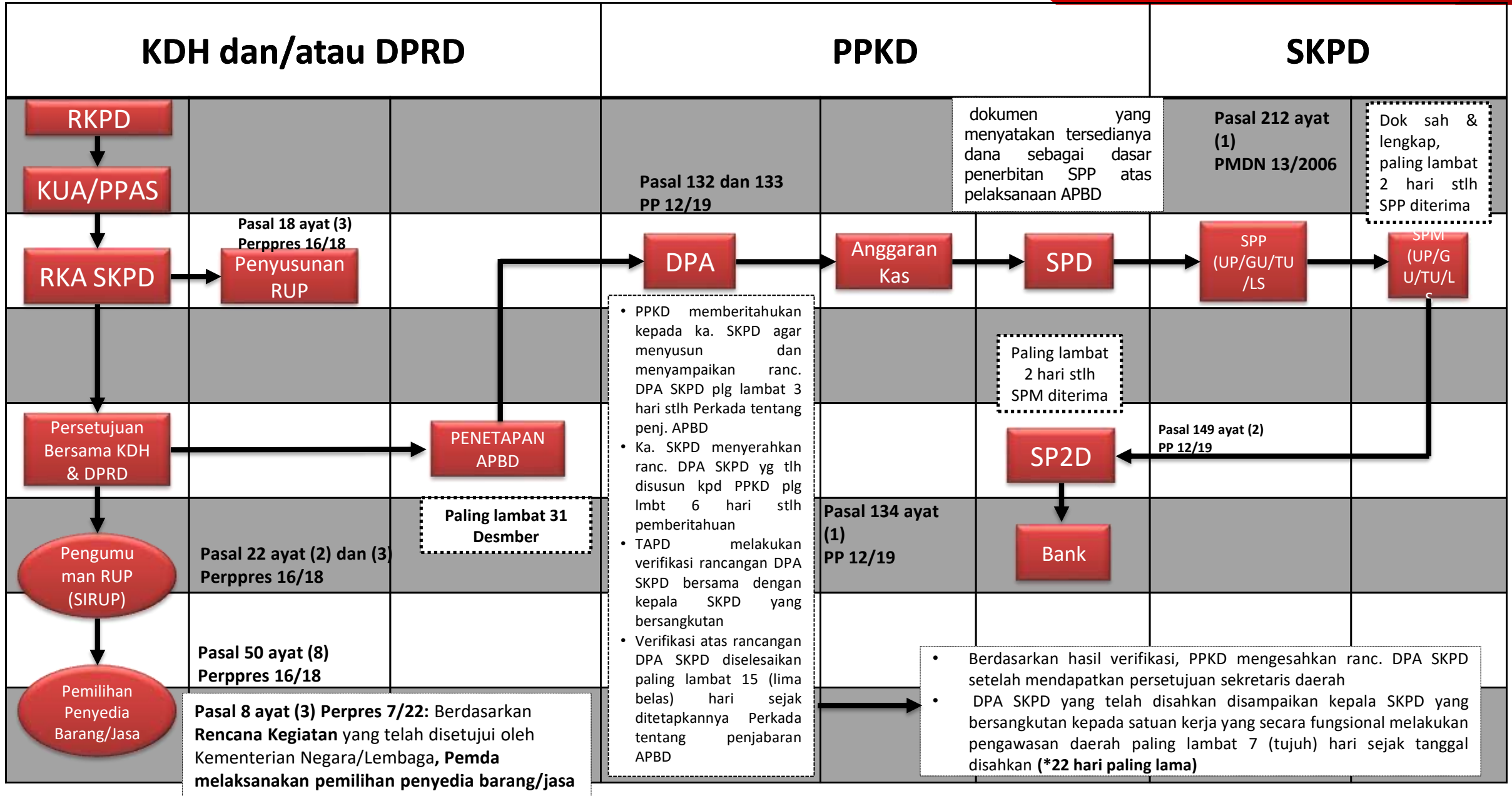


- kondisi ekonomi makro Daerah;
- asumsi penyusunan APBD;
- kebijakan Pendapatan Daerah;
- kebijakan Belanja Daerah;
- kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- strategi pencapaiannya.

- menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;
- menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan
- menyusun capaian Kinerja, Sasaran, dan plafon anggaran sementara

Dibahas bersama DPRD

Dibahas dan disetujui oleh DPRD





STRATEGI PERCEPATAN PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH



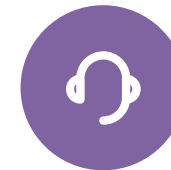
**Kenali Petunjuk Teknis
Penggunaan DAK/Petunjuk
Operasional DAK**



**Penetapan Target Output
Kegiatan dan Lokasi
Kegiatan DAK**



**Percepatan Penganggaran
DAK Dalam APBD**



**Percepatan Pengadaan
Barang/Jasa DAK**



**Memperhatikan Jadwal dan
Tahapan Penyaluran DAK**

KEBIJAKAN DAK NON-FISIK TAHUN 2023

Operasionalisasi Layanan Pendidikan dan Kesehatan



Bantuan Operasional Sekolah (BOS)



Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus



Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)



Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD



Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan



Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD



Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)



Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya



Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Mendukung Pencapaian Target PN dan MP*



Pelayanan Kepariwisataaan



Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM



Peningkatan Kapasitas KUKM (PK2UKM)



Fasilitas Penanaman Modal



Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)



Ketahanan Pangan dan Pertanian

*DAK NF jenis (1) Pelayanan Kepariwisataaan; (2) Penguatan kapasitas kelembagaan dan sentra IKM; serta (3) Peningkatan Kapasitas KUKM ditujukan untuk mendukung DAK Fisik 2022 atau disesuaikan dengan kebutuhan desain MP

(Contoh DAK NF Pelayanan Kepariwisataaan 2023 diberikan pada DTW yang diintervensi tahun 2022)

DAK NF jenis (1) Fasilitas Penanaman Modal; (2) PPA; dan (3) Ketahanan Pangan dan Pertanian ditujukan sesuai arahan Presiden/Sidang Kabinet



IMPLIKASI SIPD & KODEFIKASI, KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN DAK TA 2023



PENYUSUNAN KODEFIKASI, KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN & KEUANGAN DAERAH

Pasal 393 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 2 ayat (1) & (2) Permendagri 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perenc. Pembangunan & Keuda

- Pemerintah Daerah Menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
- Penyusunan dokumen dengan menggunakan **Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur** yang digunakan pada tahapan:

Perencanaan Pembangunan Daerah

01

Perencanaan Anggaran Daerah

02

Pelaksanaan & Penatausahaan Keuda

03

Akuntansi & Pelaporan Keuda

04

Pertanggungjawaban Keuda

05

Pengawasan Keuda

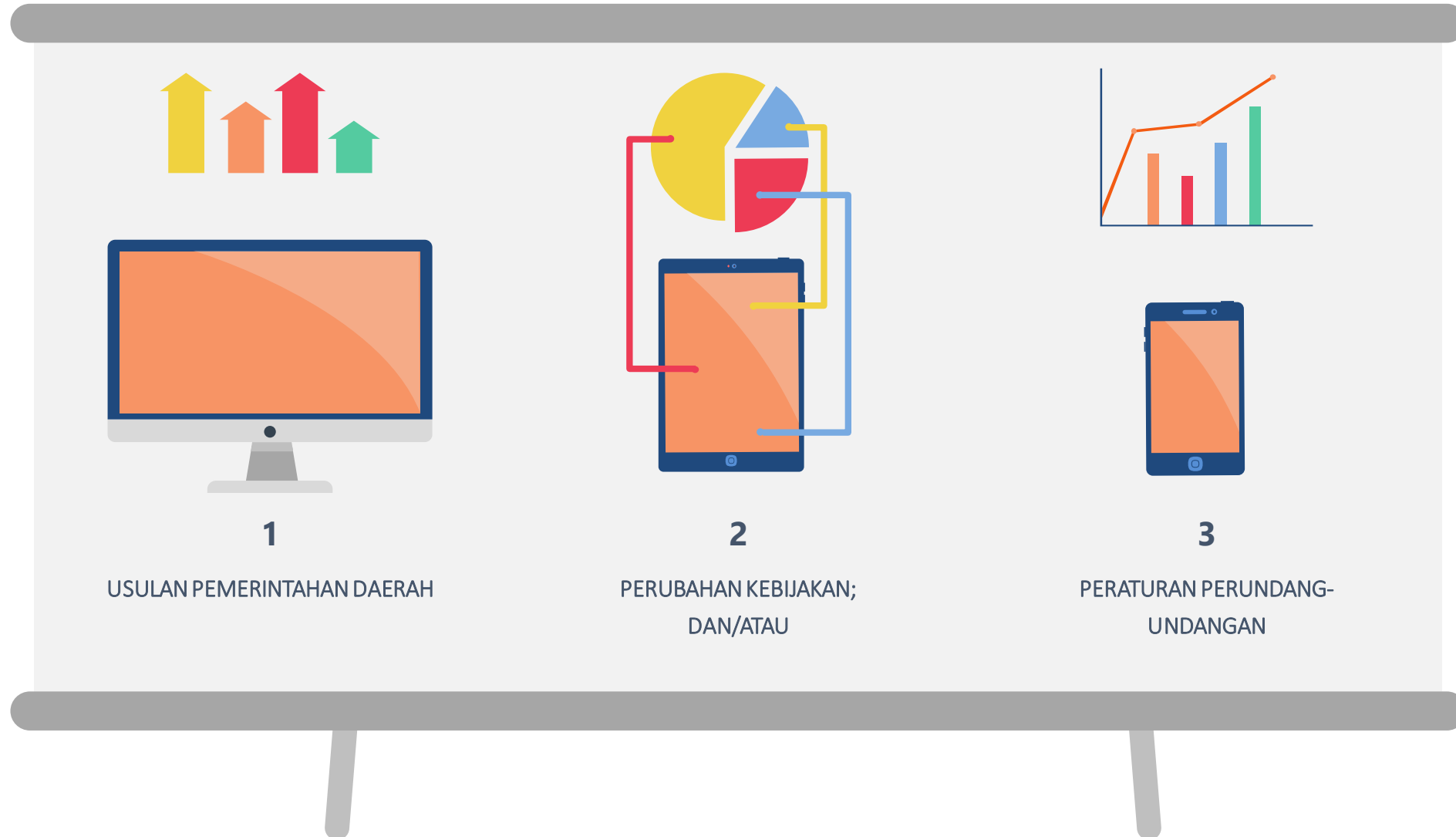
06

Analisis Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya

07



PEMUTAKHIRAN TERHADAP KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DALAM APBD





MONEV PELAKSANAAN DAK FISIK DAN NONFISIK TA 2022



Kendala Umum Pelaksanaan DAK di Daerah

KOMITMEN

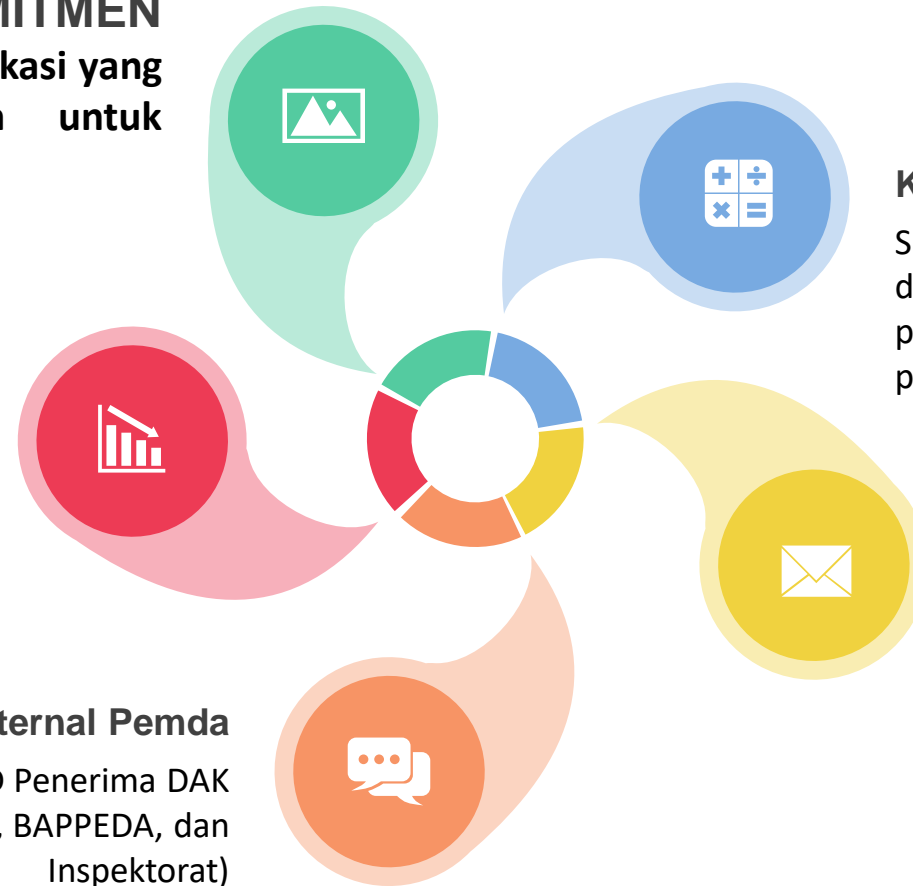
Kurangnya Komitmen Pemda terhadap alokasi yang diterima dengan kesiapan dokumen untuk penyaluran

Komunikasi dan Koordinasi

Koordinasi, komunikasi, integrasi Pemda penerima dgn K/L, misalnya pemahaman Perpres Juknis DAK Nonfisik

Koordinasi Internal Pemda

Kurangnya koordinasi antara SKPD Penerima DAK penerima dengan TAPD (BPKAD, BAPPEDA, dan Inspektorat)



Kapasitas SDM

SDM yg belum memahami Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional dari aspek pengelolaan Keuda (Hibah, Bansos daerah, penganggaran dalam Kode rekening Keuda);

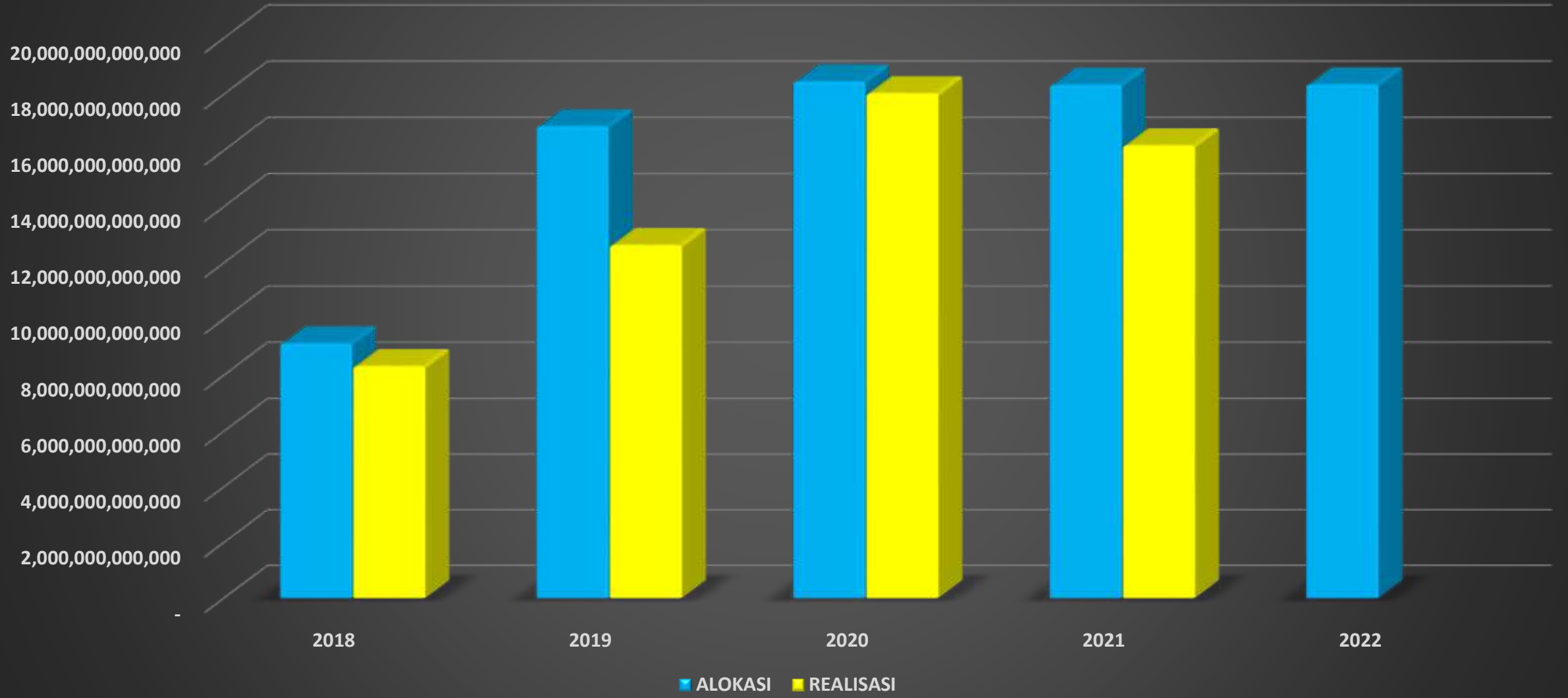
Kepegawaian

Mutasi, rotasi, dan promosi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah

**ALOKASI DAN REALISASI
DAK FISIK (BIDANG PENDIDIKAN,
KESEHATAN DAN INFRASTRUKTUR)
TA 2018-2022**

DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2018-2022

Pendidikan



PENDIDIKAN

TAHUN

ALOKASI

REALISASI

2018

9.137.517.000.000

8.321.566.860.810

2019

16.859.000.000.000

12.628.591.132.000

2020

18.453.186.824.000

18.028.306.418.799

2021

18.333.059.942.000

16.177.383.297.852

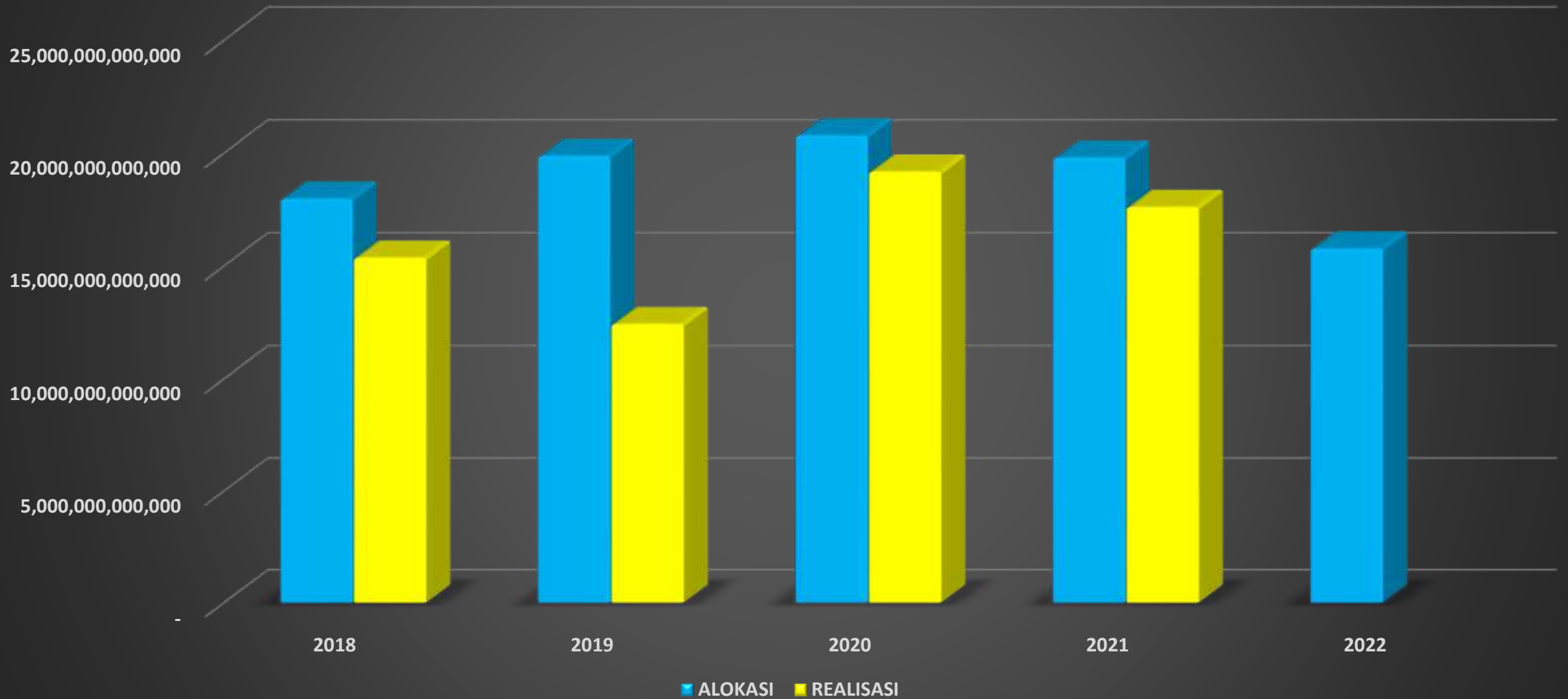
2022

18.348.532.876.000

-

DAK Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2018-2022

Kesehatan



KESEHATAN

TAHUN

ALOKASI

REALISASI

2018

17.979.705.000.000

15.362.322.714.320

2019

19.875.400.000.000

12.424.631.623.000

2020

20.781.200.000.000

19.174.650.239.679

2021

19.796.485.885.000

17.608.114.877.882

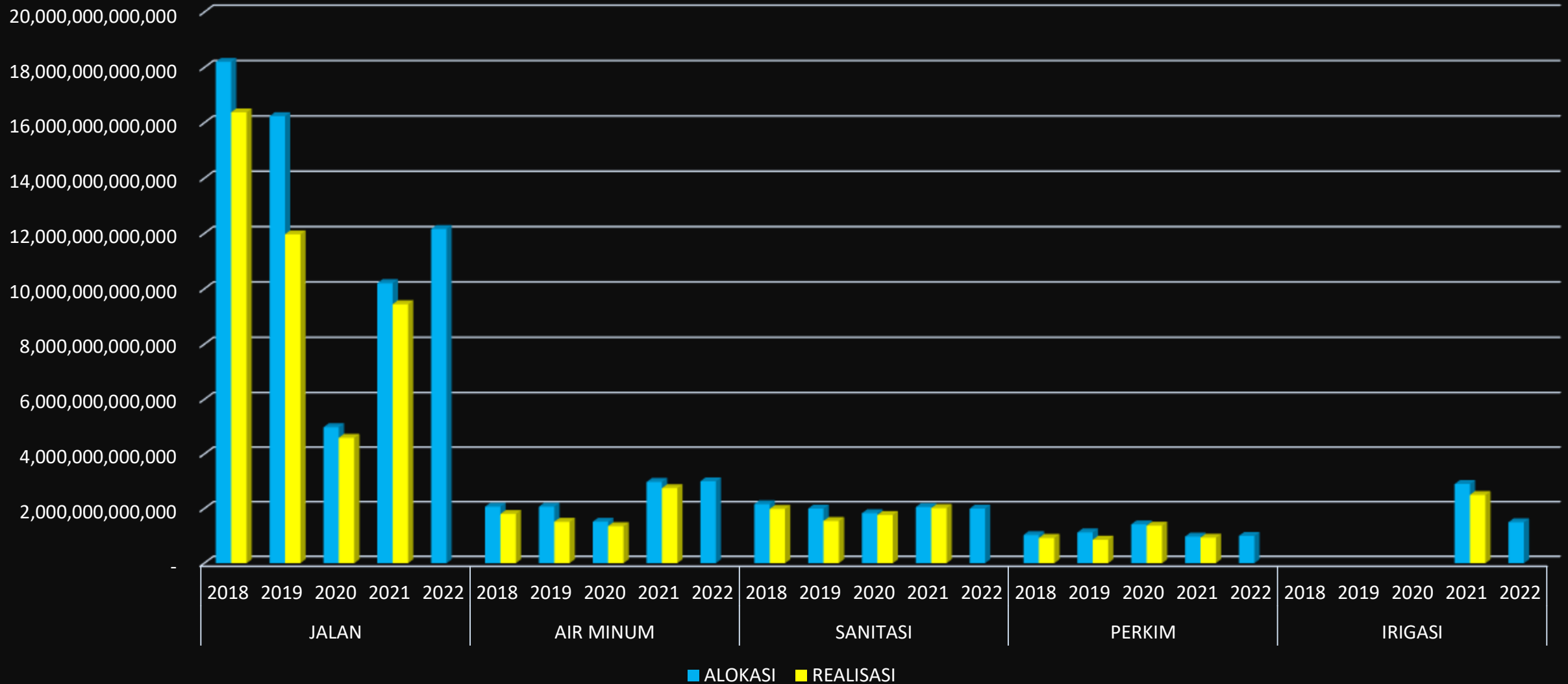
2022

15.774.280.058.000

-

DAK Fisik Bidang Infrastruktur Tahun 2018-2022

Infrastruktur



BIDANG	TAHUN	ALOKASI	REALISASI
JALAN	2018	18.202.963.000.000	16.379.430.785.470
	2019	16.243.600.000.000	11.972.998.818.000
	2020	4.981.507.455.000	4.591.784.485.057
	2021	10.210.344.809.000	9.447.241.321.134
	2022	12.165.166.817.000	-
AIR MINUM	2018	2.070.736.000.000	1.803.231.008.020
	2019	2.070.750.000.000	1.513.790.272.000
	2020	1.515.865.102.000	1.355.349.644.586
	2021	2.977.364.075.000	2.747.447.685.017
	2022	3.000.000.000.000	-
SANITASI	2018	2.160.982.000.000	1.984.842.111.830
	2019	2.000.000.000.000	1.546.025.775.000
	2020	1.833.653.730.000	1.766.590.055.051
	2021	2.057.900.484.000	2.019.827.454.611
	2022	2.000.000.000.000	-
PERKIM	2018	1.029.601.000.000	925.646.111.970
	2019	1.126.460.000.000	858.676.203.000
	2020	1.419.852.166.000	1.374.509.610.898
	2021	975.784.325.000	934.544.223.822
	2022	1.000.000.000.000	-
IRIGASI	2018	-	-
	2019	-	-
	2020	-	-
	2021	2.901.015.016.000	2.498.919.696.335
	2022	1.500.000.000.000	-



TERIMAKASIH²¹



ditjenbinakeuda



ditjenbinakeuda



ditjenbinakeuangaera